

BAB I.

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor perekonomian yang terus berkembang pesat dari tahun ke tahun. Saat semua sektor ekonomi dalam tren perlambatan, sektor pariwisata menjadi sektor yang pertumbuhannya tetap terjaga. Sebagai contoh, di tingkat global, pertumbuhan sektor pariwisata sepanjang 2005-2012 di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) rata-rata sebesar 8,3 persen per tahun, melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi global yang hanya 3,6 persen.

Di Indonesia, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan industri pariwisata di Indonesia mencapai 6,8 persen pada 2014, melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya sebesar 5,7 persen. Sektor pariwisata berkontribusi Rp 347 triliun atau sekitar 3,8 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menjadi penyumbang devisa terbesar keempat. Jika dihitung bersama dampak penggandanya (*multiplier effect*), kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB di Indonesia mencapai 9 persen.

Perkembangan sektor pariwisata tentu saja berhilir pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja dan pemberian nilai tambah pada produk serta jasa penunjang pariwisata yang dikembangkan oleh masyarakat. Karakter sektor ini memang inklusif karena dampak ekonominya langsung dirasakan lewat transaksi ekonomi yang terjadi.

Dari sisi penyerapan tenaga kerja, terdapat 10,18 juta orang yang bekerja di sektor pariwisata sehingga membuat sektor tersebut sebagai penyumbang tenaga kerja terbesar keempat dari total jumlah pekerja di seluruh Indonesia. Kunjungan wisatawan mancanegara juga terus meningkat dari tahun ke tahun seperti ditunjukkan dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Tingkat Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia

Tahun	Jumlah Wisatawan Mancanegara
2010	7.022.944
2011	7.649.731
2012	8.044.462
2013	8.802.129
2014	9.435.411
Rata-Rata Pertumbuhan (%)	7,65

Sumber: Badan Pusat Statistik (2015)

Sektor pariwisata dari tahun ke tahun terus menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Peringkat daya saing pariwisata Indonesia terus meningkat ke peringkat 50 dari 141 negara berdasarkan laporan *Travel and Tourism Competitiveness Report 2015* dari *World Economic Forum* (WEF). Sebelumnya, Indonesia berada di peringkat 70. Daya saing pariwisata ditentukan berdasarkan sejumlah faktor penunjang antara lain infrastruktur, amenitas (fasilitas penunjang), kualitas sumberdaya manusia (SDM), aksesibilitas, tingkat kebersihan dan sanitasi, dan berbagai faktor lain.

Meski menunjukkan perkembangan menggembirakan, Indonesia masih kalah jika dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN. Daya saing pariwisata Singapura berada di peringkat 11, Thailand peringkat 15, dan Malaysia peringkat 25. Dari tingkat kunjungan wisatawan mancanegara (wisman), Indonesia juga

masih kalah dibandingkan Malaysia yang didatangi 25 juta wisman, Singapura 12 juta wisman, dan Thailand 26 juta wisman.

Pemerintah saat ini terus berupaya meningkatkan kinerja sektor pariwisata. Pemerintah menargetkan bisa mendatangkan wisman hingga 20 juta orang pada 2019. Untuk meningkatkan kunjungan wisman, Kementerian Pariwisata meningkatkan dana promosi dari sebelumnya Rp 300 miliar menjadi Rp 1 triliun pada tahun ini, dan ditargetkan bisa mencapai Rp 4 triliun pada 2016. Dengan dana tersebut, pemerintah berharap bisa membantu promosi pariwisata daerah yang dirasa masih sangat kurang.¹

Salah satu daerah yang cukup gencar melakukan perbaikan dan pengembangan sektor pariwisata adalah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Selama empat tahun terakhir, daerah di ujung timur Pulau Jawa itu secara masif melakukan pengembangan pariwisata, baik melalui wisata budaya, pengembangan wisata alam, maupun wisata *event* (*event tourism*).

Pengembangan pariwisata di Banyuwangi dilakukan berdasarkan potensi wisata di kabupaten tersebut. Sektor pariwisata dipilih karena merepresentasikan potensi kabupaten tersebut. Banyuwangi dikelilingi dua taman nasional, lautan, dan pegunungan. Hal itu selama ini kerap menjadi hambatan bagi pengembangan daerah karena membuat Banyuwangi seolah berada di daerah terpencil. Namun, saat ini, kondisi geografis tersebut justru dijadikan oleh Banyuwangi sebagai

¹ <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/05/26/noya7a-menpar-minta-anggaran-rp-4-triliun-untuk-2016>

peluang untuk pengembangan pariwisata dengan mengambil konsep ekoturisme atau *ecotourism*².

Banyuwangi sengaja memilih tidak meniru pengembangan pariwisata Kota Batu, Malang, atau Surabaya yang banyak berpijak pada wisata buatan dan wisata belanja. Dengan menawarkan alam yang apa adanya, Banyuwangi berharap bisa membidik segmen wisatawan penggemar alam, budaya, dan petualangan.

Ekoturisme sendiri adalah konsep wisata yang menyajikan kondisi di suatu daerah secara apa adanya dengan memperhatikan daya dukung dan keberlanjutan lingkungan. Konsep ekoturisme yang diterapkan bersumbu pada dua pijakan, yaitu budaya dan alam. Dalam hal ini, Banyuwangi mengembangkan wisata budaya dan alam, yang keduanya disajikan secara apa adanya. Wisata budaya dikembangkan karena daerah tersebut mempunyai budaya unik dari masyarakat Suku Osing,. Adapun wisata alam digarap karena potensi daerah tersebut yang memang kaya pantai, pegunungan, dan perkebunan. Sejumlah daya tarik wisata alam di Banyuwangi antara lain Pantai Plengkung (G-Land), Pantai Pulau Merah, Kawah Ijen, Pantai Sukamade, Perkebunan Kalibendo, dan Pantai Teluk Hijau.

Pengembangan pariwisata di Banyuwangi dipayungi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Banyuwangi. Perda tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Poin konsideran dalam UU tersebut menyatakan bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis,

² <http://www.jawapos.com/baca/artikel/12860/Inovasi-Bupati-Banyuwangi-Abdullah-Azwar-Anas-1>

terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Dengan demikian, daerah dituntut berperan aktif dalam pengembangannya.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota. Di dalam Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 30 huruf a UU Kepariwisataan, pemerintah daerah (pemerintah provinsi dan kabupaten/kota) berwenang untuk menyusun menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan yang diatur melalui Peraturan Daerah (Perda). Atas dasar itulah, Pemkab Banyuwangi menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Banyuwangi. Sebagaimana ketentuan UU Kepariwisataan, rencana induk pembangunan kepariwisataan berisi perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan.

Sebagaimana tertulis pada poin konsideran Perda Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Kabupaten Banyuwangi, pengembangan pariwisata dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, pemerataan kesempatan berusaha dan peningkatan kesejahteraan rakyat, sehingga Pemkab Banyuwangi berkewajiban melaksanakan pembangunan kepariwisataan yang sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap

memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, sosial dan budaya yang hidup di masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Pengembangan pariwisata Banyuwangi juga merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional. Di dalam PP tersebut disebutkan adanya 222 Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) se-Indonesia di mana di Banyuwangi ditetapkan terdapat tiga KPPN, yaitu kawasan Ijen-Baluran, G-Land – Taman Nasional Alas Purwo, dan Taman Nasional Meru Betiri.

Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi juga mengatur tentang isu-isu strategis dan prioritas dalam pembangunan Banyuwangi. Pariwisata menjadi isu strategis yang ketiga setelah dua isu strategis lainnya, yaitu pengembangan bidang pendidikan-kesehatan dan pengentasan kemiskinan-pengangguran. Di RPJMD, sektor pariwisata ditemalikan dalam isu strategis bersama revitalisasi sektor pertanian dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Digabungkannya sektor pariwisata dan pertanian serta UMKM karena ketiga sektor tersebut sejatinya berhubungan. Kemajuan sektor pariwisata diikuti dengan perkembangan sektor penopangnya, seperti kuliner, kerajinan, dan beragam buah tangan yang mayoritas diproduksi oleh sektor UMKM. Di dalam RPJMD disebutkan, apabila potensi wisata bisa dikembangkan secara baik, maka industri lainnya juga akan berkembang dengan baik, termasuk UMKM yang banyak menghasilkan produk penopang sektor pariwisata.

Adapun sektor pertanian dijadikan lansekap pendukung pengembangan pariwisata Banyuwangi yang berkonsep ekowisata. Sektor pertanian didesain bisa mendapat nilai tambah dari pengembangan pariwisata, yang salah satunya bermodelkan pariwisata berbasis potensi pertanian (*agro-tourism*).

Sebagai penunjang pengembangan pariwisata, juga akan diterbitkan Perda Perlindungan Cagar Budaya yang telah disepakati bersama oleh eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Saat ini Perda tersebut sedang menunggu persetujuan dari Gubernur Provinsi Jawa Timur.

Secara teknis, pengembangan pariwisata Banyuwangi dilakukan melalui pergelaran Banyuwangi Festival yang diselenggarakan sejak 2012. Banyuwangi Festival merupakan rangkaian promosi wisata yang dikemas dalam bentuk *event* (*event tourism*) wisata budaya dan wisata alam. Sejumlah *event* dalam rangkaian kegiatan tersebut, antara lain, International Tour de Banyuwangi Ijen, Festival Gandrung Sewu, *Banyuwangi Ethno Carnival*, *Beach Jazz Festival*, Jazz Ijen, Festival Ngopi Sepuluh Ewu, Festival Kebo-keboan, dan Festival Kuliner Lokal. Pada 2015, Banyuwangi Festival mengagendakan 36 *event* wisata sepanjang tahun dengan berbagai kemasan.³

Dalam perkembangannya, pengembangan pariwisata yang dilakukan mulai membuahkan hasil. Tingkat kunjungan wisatawan di daerah tersebut meningkat. Kunjungan wisatawan mancanegara meningkat 97 persen dari 14.021 wisatawan pada 2013 menjadi 27.698 pada 2014. Adapun wisatawan domestik tumbuh 66

³ <http://indonesia.travel/id/news/detail/1617/36-event-hadir-di-banyuwangi-festival-b-fest-2015>

persen dari 901.759 wisatawan pada 2013 menjadi 1.500.735 wisatawan pada 2014 (data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi, 2015).

Tabel 1.2 Jumlah Wisatawan Domestik dan Mancanegara di Banyuwangi

Tahun	Wisatawan Domestik	Wisatawan Mancanegara
2012	660.831	8.690
2013	901.759	14.012
2014	1.500.735	27.689
Rata-Rata Pertumbuhan (%)	51,43	79,42

Sumber: Disbudpar (2015)

Dari tabel tersebut bisa dilihat bahwa rata-rata pertumbuhan setiap tahun sejak 2012 untuk wisatawan domestik mencapai 51,43 persen dan wisatawan mancanegara 79,42 persen. Data tersebut menunjukkan, kebijakan pengembangan pariwisata diintensifkan sejak 2011 berdampak cukup signifikan pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, baik wisatawan domestik maupun mancanegara.

Untuk mengukur dampak ekonomi, khususnya pada kunjungan wisatawan mancanegara, Pemkab Banyuwangi menyewa lembaga riset independen Alvara Research untuk mengetahui pola belanja dan karakter wisatawan mancanegara. Dari riset yang dilakukan Alvara Research (2014) diketahui bahwa lama kunjungan turis asing di Banyuwangi rata-rata 2,3 hari dengan belanja per hari sekitar Rp 1.900.000 per orang.

Meski perkembangannya menggembirakan, masih ada sejumlah ganjalan dalam pengembangan pariwisata daerah. Sejumlah problem yang tampak di antaranya adalah (1) kapasitas sumberdaya manusia (SDM) yang relatif belum siap, (2) amenities (infrastruktur penunjang) yang belum lengkap, (3) perebutan

”kue” ekonomi dari *booming* pariwisata yang belum terkondisi dengan baik karena kelembagaan yang lemah, dan (4) ancaman kontinuitas program terkait pergantian kepemimpinan daerah di masa mendatang.

Dari sisi kualitas SDM, masih belum banyak tenaga pariwisata yang tersertifikasi. Pemerintah melalui sinergi Kementerian Pariwisata dan Pemkab Banyuwangi baru akan melakukan sertifikasi tenaga pariwisata untuk menyambut implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dengan sertifikat dari ASEAN Common Competency Standards for Tourism Professionals (ACCSTP). ACCSTP adalah sertifikasi yang telah disepakati dan diakui oleh kalangan pelaku industri pariwisata.⁴

Amenitas yang kurang mendukung direpresentasikan pada belum siapnya Banyuwangi dalam menerima lonjakan kunjungan wisatawan. Salah satunya adalah permasalahan hotel, di mana sejumlah hotel berbintang baru berdiri pada 2015. Secara eksplisit, Pemkab Banyuwangi juga menyatakan bahwa daerahnya mengalami kekurangan hotel seiring dengan menggeliatnya pariwisata.⁵

Dari sisi perebutan ”kue” ekonomi, terdapat beberapa permasalahan. Pasca-pengembangan wisata Gunung Ijen melalui Jazz Ijen dan International Tour de Banyuwangi Ijen yang ada di Banyuwangi Festival, lonjakan wisatawan ke kawasan tersebut belum dikelola dengan baik. Kebijakan pengembangan pariwisata justru menghasilkan perubahan negatif dengan adanya tindakan yang sudah masuk kategori kriminal. Perubahan negatif ini yang disebut Edwards

⁴ <http://www.kabarbisnis.com/read/2855425/menteri-pariwisata-fasilitasi-sertifikasi-sdm-pariwisata-banyuwangi-berlevel-asean>

⁵ <http://surabaya.tribunnews.com/2015/03/10/banyuwangi-kekurangan-1000-kamar-hotel>

sebagai ”*substantial unanticipated change*” sebagai akibat dari adanya kesenjangan dalam implementasi kebijakan.

Sebagai contoh, terdapat aksi pemaksaan dan bahkan pemalakan kepada wisatawan untuk menggunakan jasa kendaraan *four wheel drive* (4WD atau 4X4) untuk menuju kaki Gunung Ijen.⁶ Aksi tersebut tidak terlepas dari pembangunan infrastruktur ke Gunung Ijen seiring dengan kebijakan pengembangan pariwisata yang tampaknya tidak diantisipasi dengan konsekuensi berkurangnya pemasukan para pengelola jasa sewa kendaraan 4x4. Dulu, menuju ke Gunung Ijen memang lebih nyaman menggunakan kendaraan 4x4 karena jalanan yang kurang baik, namun setelah ada kebijakan pengembangan pariwisata, jalanan mulus, bahkan mobil keluarga pun bisa mencapai kaki Gunung Ijen. Di sisi lain, pemerintah setempat belum menyiapkan skema yang pas untuk memberdayakan kelompok usaha tersebut yang penghasilannya berkurang karena wisatawan memilih memakai mobil pribadi atau sewaan mobil keluarga untuk menuju Gunung Ijen. Dengan kondisi tersebut, perlu dipertimbangkan adanya instrumen kebijakan tersendiri yang lebih tegas mengatur rinci pengelolaan per destinasi wisata.

Perebutan ”kue” ekonomi juga tampak dalam sengketa antar-kelompok pemuda dan kelompok masyarakat beserta pemerintah terkait bagi hasil dalam pengelolaan Pulau Merah. Destinasi wisata itu dulu sepi dan kini ramai oleh ribuan wisatawan pada akhir pekan, sehingga tanpa penyiapan kelembagaan yang pas telah memicu sengketa antarkelompok kepentingan untuk berebut ”kue”

⁶ <https://www.kabarbanyuwangi.info/aksi-palak-wisatawan-semakin-marak.html>

ekonomi, seperti tempat parkir, pembagian tiket masuk, dan pengelolaan stan untuk berjualan.⁷

Adapun ancaman kontinuitas program pengembangan pariwisata terkait dengan kekhawatiran pergantian kepemimpinan daerah di masa mendatang. Sebagaimana tipikal kebijakan daerah di negara berkembang, infrastruktur kelembagaan pariwisata di Banyuwangi belum terbentuk secara baik—berbeda dengan Bali, misalnya, yang telah memulai pengembangan pariwisata sejak 100 tahun lalu sehingga kelembagaannya terbentuk dengan baik. Diakui atau tidak, faktor penggerak utama kebijakan pengembangan pariwisata di Banyuwangi adalah karena pemimpin daerahnya. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri di antara para pelaku pariwisata setempat terkait kontinuitas program.

Praktik kebijakan pengembangan pariwisata telah menjadi bahasan dalam sejumlah penelitian. Arieta (2012) melakukan penelitian tentang kebijakan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism*) pada masyarakat pesisir untuk mencari tahu tentang dampaknya terhadap keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Penelitian ini berfokus untuk mengukur dampak kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan dampak pada penerapan konsep *community based tourism* cukup positif untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah yang bisa menimbulkan ketergantungan, karena selama ini bantuan pemerintah lebih bersifat karitatif.

Studi lainnya dilakukan oleh Jupir (2013) yang meneliti implementasi kebijakan pariwisata berbasis kearifan lokal di Kabupaten Manggarai Barat.

⁷ <https://www.kabarbanyuwangi.info/protes-pengelolaan-pulau-merah.html>

Penelitian Jupir tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Implementasi kebijakan pariwisata berbasis kearifan lokal, berdasarkan hasil penelitian tersebut, belum optimal karena faktor-faktor penunjangnya tidak disediakan dengan baik, mulai dari sumber daya pendukung hingga struktur birokrasi. Sejumlah hasil yang mengemuka dalam penelitian tersebut adalah implementasi menggunakan pendekatan *top down*, minimnya ruang partisipasi publik, promosi kurang memadai, dan kinerja pelaksana kebijakan yang kurang optimal.

Studi berikutnya dilakukan oleh Tri Mulyo dkk (2013) tentang implementasi kebijakan pembangunan Kawasan Wonorejo Terpadu, kawasan baru ekonomi berbasis rekreasi di Kabupaten Lumajang. Hasil penelitian menunjukkan dampak kebijakan tidak berjalan sesuai harapan untuk mewujudkan kawasan baru berbasis rekreasi yang terintegrasi dengan sektor ekonomi rakyat.

Penelitian selanjutnya dilakukan Setyorini (2004) tentang dampak kebijakan pariwisata di Kabupaten Semarang dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat secara jangka panjang. Kesimpulan penelitian menunjukkan kebijakan yang ada paralel dengan ikhtiar untuk memacu pendapatan masyarakat dengan sejumlah catatan, antara lain, ke depan perlu dikembangkan keterkaitan ke dalam dan ke luar dengan mengembangkan subkawasan pariwisata dan hal-hal yang relevan lainnya.

Studi terkait kebijakan pariwisata juga dilakukan oleh Liedewij van Breugel (2013) yang membandingkan penerapan kebijakan pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism*) di dua wilayah di Thailand, yaitu Desa

Mae La Na dan Koh Yao Noi. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penerapan konsep pariwisata berbasis masyarakat adalah metode yang pas untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Penelitian Breugel ini lebih berfokus pada sisi masyarakatnya terkait bagaimana proses masyarakat mengelola pengembangan wisata di dua daerah yang dijadikan lokasi penelitian.

Penelitian ini diikhtiarkan untuk mencoba menambah khazanah penelitian di bidang kepariwisataan, khususnya dalam hal implementasi kebijakan. Dalam penelitian-penelitian terdahulu yang dipaparkan tersebut, mayoritas banyak mengkaji "dampak" dari kebijakan pariwisata, kecuali Jupir (2003) yang menelaah implementasi kebijakan pariwisata berbasis kearifan lokal. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Jupir adalah pada fokus. Jupir langsung memfokuskan diri pada masalah kearifan lokal, dan dengan demikian membicarakan wisata budaya. Adapun penelitian ini mengerangkai implementasi kebijakan pariwisata dalam konteks yang lebih makro. Penulis juga tertarik mengangkat penelitian ini karena Banyuwangi merupakan daerah yang baru saja mengembangkan sektor pariwisatanya, sehingga diharapkan bisa memetakan masalah tipikal yang dihadapi daerah yang baru saja menggarap sektor pariwisatanya. Munculnya berbagai masalah yang mengiringi implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Banyuwangi juga diharapkan bisa memunculkan model kebijakan pariwisata yang ideal untuk memberi nilai tambah optimal bagi seluruh pemangku kepentingan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis sampaikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi?; dan (2) bagaimana model kebijakan pariwisata yang ideal?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi;
2. Mengetahui model kebijakan yang ideal tentang pengembangan pariwisata serta faktor-faktor penghambat dan pendukungnya

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua bagian sebagai berikut:

1. Secara akademis

Manfaat penelitian secara akademis bisa dipetakan dalam dua aspek, yaitu teoretis dan metodologis. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan bisa menjawab kesenjangan antara teori-teori terkait dan penelitian sejenis yang pernah dilakukan. Adapun secara metodologis, penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi pada upaya mencari model metodologi yang tepat untuk meneliti masalah di sektor pariwisata

2. Secara praktis

Menjadi rekomendasi untuk mencari model kebijakan yang efektif dan solutif terhadap permasalahan bidang pariwisata